



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

SELASA, 9 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Selasa, 9 Juli 2019, Pukul 08.03 – 09.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Supriyanto
Syamsuudin Noer**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imran Mahfudi
2. Benny Hutabarat

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. H. Yasin
2. Ujang

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Safril Partang
2. Abdul Lukman Hakim
3. Ridwan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Faudjan Muslim
2. Imam Sutopo
3. Anton Aryadi

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Deviyanti Dwiningsih
2. Ridwan Seri Tarigan
3. Tangirawan

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019:

Matea

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019:

1. Deviyanti Dwiningsih
2. Ridwan Seri Tarigan
3. Tangirawan
4. Very Junaidi
5. Slamet Santoso

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Feldy Taha
2. Dwi Retnowati Oerini

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Rudjito
2. Budi Rahman
3. Sutejo
4. Berna Sudjana Ermaya
5. Liani Afrianty

J. Kuasa Hukum Bawaslu:

1. Mochammad Afifuddin
2. Jamaludin Lado Rua
3. Niko Tunjanan
4. Amandus Situmorang
5. Anugrah Pata
6. Metusalak Infandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.03 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai PBB, Perkara Nomor 27 [Sic!] -07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Beringin Karya, Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, Perkara Nomor 4 ... Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Gerakan Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, untuk Perkara Nomor 33-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini ... Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Perkara Nomor 82-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Sudah hadir, perkara ... Kuasa Perkara Nomor 82-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk partai demo ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)? Sudah hadir? Kita berusaha untuk selalu on time, walaupun tadi kami masuk pukul 08.01 WIB. Nah, ini Kuasanya pukul 08.03 WIB. Jadi, terlambat 2 menit dari Hakim, ya.

Silakan, memperkenalkan diri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Ada ... masih ada teman satu orang lagi. Saya Imran Mahfudi beserta teman saya, Benny Hutabarat.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Kita berharap, besok jangan terlambat lagi untuk semua pihak. Nanti kalau terlambat, kita bisa ... apa namanya ... meminta untuk tidak perlu masuk, gitu.

Lalu, untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan, Partai Bulan Bintang! Kuasanya sudah hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya, Pak Yasin dengan rekan saya, Juang.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAFRIL PARTANG

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Safril Partang. Yang kedua, Abdul Lukman Hakim. Dan yang ketiga, Ridwan. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Keadilan Sejahtera!

10. KUASA HUKUM PEMOHON 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera hadir sebagai Pemohon, hadir pada kesempatan pagi hari ini sebagai Kuasa Hukumnya, terdiri dari saya Faudjan Muslim. Rekan sebelah saya, Bapak Imam Sutopo. Dan sebelah lagi, Bapak Anton Aryadi.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ASWANTO

Kenapa tidak di sini? Ini masih kosong ini? Seat-nya ... ini untuk siapa ini? Partai mana ini?

12. KUASA HUKUM:

Satu kursi untuk PBB, Pak.

13. KETUA: ASWANTO

Pakai aplikasi, tidak bisa. Oke, baik, ini karena kita pakai aplikasi. Kemudian, untuk Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia? Silakan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia! Kuasanya sudah hadir? Belum hadir, kuasanya? Baik.

Selanjutnya, Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia! Ini juga kuasanya belum hadir? Baik.

Jadi, dua yang belum hadir, ya? Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum hadir, ya?

Selanjutnya, Pihak Termohon, KPU? Silakan, perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini!

14. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Bismilahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari KPU memperkenalkan diri. Karena dari Pihak KPU ini Kuasa Hukumnya terdiri dari 5 kantor, jadi kami akan memperkenalkan masing-masing.

Kami dari Kantornya AnP, dari Kantornya Pak Ali Nurdin. Nama saya, Muhammad Rudjito. Kemudian, sebelah saya, Bapak Budi Rahman. Begitu, Yang Mulia. Mungkin dari sebelah kami.

15. KETUA: ASWANTO

Silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SUTEJO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya, Sutejo dari Kantor Nurhadi Sigit Law Office.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih. Kami dari Kantor Absar Kartabrata dalam Perkara 161/PHPU.DPRD/XVII/2019 dan Perkara 11/PHPU.DPRD/XVII/2019, kami hadir Berna Sudjana Ermaya sama Liani Afrianty.

18. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada yang belum memperkenalkan diri?

19. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Maaf, Yang Mulia. Sebagai tambahan kami dalam hari ini untuk Provinsi Papua untuk menangani Perkara Nomor 207/PHPU.DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Nomor 144/PHPU.DPRD/XVII/2019 PKPI, Nomor 170/PHPU.DPRD/XVII/2019 Golkar, Nomor 100 ... Perkara Nomor 116/PHPU.DPRD/XVII/2019 PAN, dan Perorangan Nomor 250 (...)

20. KETUA: ASWANTO

Yang ... yang belum di ... yang belum disebut nanti saja!

21. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Baik, Yang Mulia.

22. KETUA: ASWANTO

Golkar belum ada ini.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

24. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Terkait? Silakan, Pihak Terkait, untuk perkara nomor berapa? Disampaikan!

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019: DEVIYANTI DWININGSIH

Assalamualaikum wr. wb. Saya Deviyanti Dwiningsih, Kuasa Hukum dari PKS untuk Perkara 83-03-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera.

26. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya!

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019: RIDWAN SERI TARIGAN

Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019: RIDWAN SERI TARIGAN

Kami dari Ridwan Seri Tarigan dan Dr. Tangirawan Nomor Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: ASWANTO

Nomor 83-03-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 dan Nomor 96/PHPU.DPRD/XVII/2019, ya? Sama.
Masih ada lagi? Dari Pihak Terkait?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ASWANTO

Ya.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FELDY TAHA

Saya Feldy Taha dan Ibu Dwi Retnowati Oerini dari kuasa ... dari PKB untuk Nomor Perkara 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

34. KETUA: ASWANTO

Masih ada? Silakan!

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Veri Junaidi dan Slamet Santoso sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPRD/XVII/2019. Hadir juga Ibu Matea Calon Anggota Legislatif Dapil III Provinsi Papua, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.

Semua yang hadir untuk Pihak Terkait sudah menyampaikan? Sudah memperkenalkan diri? Baik.

Selanjutnya, ke Bawaslu! Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

37. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari Bawaslu, saya hadir atas nama Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin bersama 4 Komisioner Bawaslu Provinsi Papua. Ada Pak Jamaludin Lado Rua, ada Pak Niko Tunjanan, Pak Amandus Situmorang, dan Pak Anugrah Pata.

Terima kasih. Dan ada satu lagi, Pak, Metusalak Infandi. Terima kasih. Yang Mulia.

38. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Kita berharap besok jangan lagi ada Kuasa Hukum yang telat. Kalau Anda terlambat sampai 10 menit, kami tidak akan mengizinkan masuk.

Untuk semua Kuasa dari semua perkara yang disidangkan pada kesempatan ini, diminta untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan saja. Karena kami, Panel, sudah membaca secara menyeluruh, bahkan

sudah mendalami, sudah gelar perkara terhadap semua kasus-kasus yang akan kita sidangkan.

Oleh sebab itu, kita minta pada saat menyampaikan Permohonan, cukup bagian-bagian yang penting saja secara singkat. Dan kita sudah sepakat bahwa untuk masing-masing perkara diberi kesempatan 10 menit untuk mempresentasikan ... maksimal 10 menit untuk mempresentasikan pokok-pokok dari perkara yang diajukan.

Kita mulai dari Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kesempatan Bapak untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan maksimal 10 menit. Silakan!

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Pertama, kami akan menyampaikan Permohonan untuk pengisian anggota DPR ... DPR Dapil Papua, yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan adanya berkurangnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 22.472. Kemudian, Kabupaten Nabire sebanyak 71.226. Kemudian, Kabupaten Dogiyai sebanyak 50.517. Kemudian, Kabupaten Intan Jaya juga berkurang sebanyak 45 (...)

40. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak. Ini kan yang Saudara ajukan ini (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

42. KETUA: ASWANTO

Untuk Dapil Papua DPR RI (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

44. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Dapil Provinsi untuk Dapil V Papua. Kemudian, DPRD Kota Jayapura Dapil I, Dapil III, dan Dapil IV. Kemudian, DPRD

Kabupaten Lanny Jaya Dapil IV. Lalu, kabupaten ... DPRD Kabupaten Mamberamo, Mamberamo Tengah ... Mamberamo Tengah Dapil III, Tolikara Dapil II.

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya untuk masing-masing dapil, gitu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Baik. Baik. Yang tadi disampaikan terkait dengan DPR.

46. KETUA: ASWANTO

Ya. Silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Adapun jumlah perolehan suara Pemohon yang dikurangi adalah 250 ... 250.426 suara. Kemudian, ada penambahan partai lain, yaitu PKB yang terdiri (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Ini supaya klir, ya, sampaikan bagaimana kerugian Anda itu? Satu, ya. Misalnya, hilang suara di berapa, perginya ke mana, lalu itu ada di P berapa? Oke? Nah, kayak ... kayak begitu. Jadi, kita bisa mengecek semuanya itu, ya? Jadi, jangan menyebut angka, lalu tidak menunjuk di mananya, nanti Hakimnya jadi pusing. Misalnya, terjadi pengurangan suara Pemohon di 6 kabupaten di Provinsi Papua, yakni kabupaten apa (...)

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa seharusnya suara Anda, berapa yang hilang, ke mana perginya, apa buktinya? Oke?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Baik. Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan! Terima kasih, Pak Ketua.

53. KETUA: ASWANTO

Ya, terima kasih. Silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Memang di Permohonan ini, kita belum mencantumkan buktinya langsung di Permohonan, Yang Mulia. Tapi kita sudah menguraikan ... apa ... per ... apa perbedaan-perbedaan dari DAA-1 ke DB-1.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, belum ... belum dicantumkan buktinya, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Belum, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Ini kan, kami kan menilai bukti ini, tidak menilai pe ... penguraian. Penguraian ya juga, tapi harus ada bukti pendukungnya, begitu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Baik, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan!

60. KETUA: ASWANTO

Silakan!

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Jadi, total penambahan ... pengurangan suara Pemohon sebanyak 250.426. Kemudian, adanya penambahan suara PKB sebanyak 117.060. Kemudian, adanya penambahan terhadap Partai Nasdem sebanyak 48.503. Kemudian, adanya penambahan untuk Partai PAN di Kabupaten Yahukimo sebanyak 33.749.

Kemudian, kita lanjut untuk Provinsi Dapil V.

62. KETUA: ASWANTO

Ya. Untuk DPRD provinsi, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

64. KETUA: ASWANTO

Dapil V?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Dapil V, Yang Mulia.

66. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini kami bukan Pemohonnya, tapi kami tahu apa yang Anda persoalkan di situ. Ini bagaimana Pemohonnya ini?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Baik, Yang Mulia. Bahwa pelaksanaan pemilu legislatif di Dapil V menggunakan sistem noken, dimana suara diberikan oleh kepala desa kepada calon legislatif yang telah ditunjukkan berdasarkan kesepakatan tokoh agama, adat, intelektual, kepala desa, dan tokoh masyarakat dengan disaksikan oleh panwas dan saksi partai.

Bahwa Pemohon, khususnya caleg atas nama Hengki Bayage, S.AP. menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada Dapil V Kabupaten Yahukimo meliputi Distrik Obio, Distrik Werima, Distrik Hogio.

Bahwa di Kabupaten Yahukimo hasil penghitungan perolehan suara tingkat TPS tidak dituangkan ke dalam C1-DPRP berhologram oleh KPPS dengan alasan Model C1-DPRP tidak didistribusikan oleh KPU Yahukimo.

Bahwa pleno tingkat distrik dilakukan pada tanggal 18 April secara serentak di 51 Distrik Kabupaten Yahukimo oleh PPD.

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, khususnya Caleg Nomor 5 atas nama Hengki Bayage di Distrik Obio sebanyak 6.535 suara. Dimana perselisihan hasil pleno Distrik Obio, Yahukimo Daerah Pemilihan IV, Pemohon memperoleh suara bulat berdasarkan sistem noken sebanyak 6.535 suara untuk partai peserta pemilunya tidak memperoleh suara.

68. KETUA: ASWANTO

Ini juga belum menunjuk ke bukti, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya. Belum, Yang Mulia.

70. KETUA: ASWANTO

Distrik Ogio?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Obio.

72. KETUA: ASWANTO

Silakan!

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENNY HUTABARAT

Dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENNY HUTABARAT

Baik, Yang Mulia. Kami lanjut ke Kabupaten Lanny Jaya, Dapil I. Dimana di Dapil I Kabupaten Lanny Jaya, Pemohon mengalami pengurangan suara itu 1.890. Dimana sebelumnya suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi yang ada di Bukti P-26 Berita Acara, itu jumlah suara 5.100. Namun, terjadi pengurangan menjadi 3.211, itu berdasarkan Berita Acara Nomor 117, itu di P-27, Yang Mulia.

75. KETUA: ASWANTO

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENNY HUTABARAT

Kemudian, kembali lagi berdasarkan Bukti P-30 Surat Komisi Pemilihan Umum, itu terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar ... menjadi 3.211. Larinya atau bergesernya suara ini ke Partai PKPI, Yang Mulia. Memang dalam Permohonan kami, tidak kami masukkan bukti pertanda P-nya dalam Permohonan, tapi kami masukkan di ... di bukti terpisah, Majelis, Untuk Lanny Jaya.

Jadi, terjadi pengurangan sebesar 1.800 (...)

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, sebentar! Ini untuk semua pihak, ya, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait. Kalau Anda mendalilkan sesuatu, itu dijelaskan. Karena ini, kan semuanya angka-angka ini, kecuali yang ... yang ... yang kualitatif. Lalu disebutkan, dalil itu apa bukti pendukungnya? Nanti jangan bilang ini ... apa namanya ... "Mahkamah tidak menilai bukti kami." Kalau itu tidak sejajar antara yang didalilkan dengan bukti, bagaimana Mahkamah mau ma ... apa ... menilai Permohonan Saudara itu?

Jadi makanya, kuncinya sederhana saja. Ini dalil, ini penjelasannya, ini buktinya. Nah, seperti itu. Jadi, nanti penyusunan alat buktinya pun seperti itu. Ini misalnya dalilnya begini, dicantumkan di sini P sekian, nanti kami tinggal mengecek saja. Wah, ternyata ini yang didalilkan ada buktinya. Tapi kalau yang Anda dalilkan tidak ada buktinya, kan sulit juga Mahkamah bekerja untuk sesuatu yang tidak ada buktinya, ya. Bisa seperti itu, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENNY HUTABARAT

Ya, Majelis.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ini untuk semuanya, tidak hanya untuk yang perkara nomor satu ini, silakan! Terima kasih, Pak Ketua.

80. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan dilanjutkan!

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, kami langsung masuk Petitum karena waktu terbatas.

82. KETUA: ASWANTO

Ya, ya, silakan!

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya sepanjang untuk pemilihan DPR dari Dapil Papua, DPRD Provinsi Papua Dapil V, DPRD Kota Jayapura Dapil III, DPRD Kota Jayapura dapil IV, DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil I, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil III, DPRD Kabupaten Puncak Dapil III, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil II.

Tiga. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan sebagai berikut.

Pil ... pap ... RI Papua. Perolehan suara PKB=281.951 dan seterusnya sampai dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian, untuk DPRD Provinsi Papua Dapil V, PDI Perjuangan=50.899, Pemohon. Kemudian, terkait Nasdem=495 ... 49.058. Kemudian, terkait PAN=95.059. Kemudian, Demokrat=49.842.

Kemudian, DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil I khusus Distrik Niname, PDI Perjuangan=5.101. Kemudian, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil III Distrik Kelila, PDI Perjuangan=991.

Kemudian, Kabupaten Puncak Dapil III, PDI Perjuangan=3.878.
Kemudian, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil II, PDI Perjuangan=5.178.

Empat. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian keanggotaan DPRD Jayapura Dapil III di semua TPS Distrik Heram.

Lima. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian anggota DPRD Jayapura Dapil V di semua TPS di Distrik Abepura.

Enam. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

84. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ya, sesuai yang kita sudah informasikan. Bahwa ternyata dalil-dalil Saudara ini belum merujuk ke bukti, tolong nanti di ... di ... apa namanya ... diperbaiki, ya. Sehingga, kami bisa melihat secara jelas bahwa terhadap dalil ini, bukti yang diajukan untuk mendukung dalilnya adalah P berapa dan seterusnya, gitu. Terima kasih untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai PBB (Partai Bulan Bintang). Waktu Saudara juga 10 menit, sama dengan waktu yang digunakan tadi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UJANG

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok permohonan ... Pokok Permohonan kami, yang pertama ada pada DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua III, yaitu yang per ... suara atas nama Partai Bulan Bintang hilang sebanyak 40.527. Dapat dibuktikan dengan Bukti P-7, P-7 itu DA-1, dan Bukti P-8, yaitu surat ... Surat Model DA-1 dengan surat model ... surat perjanjian ... surat pernyataan kesepakatan setiap distrik.

Kemudian, suara tersebut bergeser pindah ke beberapa partai lain, yaitu ke partai PKB, Berkarya, PAN, dan Nasdem. Pergeseran suara tersebut diketahui berdasarkan Bukti P-9, DB-1. Dan juga kami melampirkan bukti ... bukti elektro ... bukti elektronik, yaitu rekaman video pada saat pleno.

Kemudian juga, Permohonan kami yang kedua, yaitu DPRD Kabupaten Tolikara di Daerah Pemilihan Tolikara II. Suara dari Partai Bulan Bintang pada Distrik Wina hilang sebanyak 3.000 ... hilang sebanyak 3.468 suara, dapat dibuktikan dengan bukti ... Bukti P-12 dan P-13, yaitu P-12 adalah DA-1 dan Bukti P-13 adalah DB-1.

Dan juga hilang ... hilangnya lagi suara kami pada distrik ... pada Distrik Gudage, Pak, dapat dibuktikan oleh C-1, dan untuk suara akhirnya dibuktikan lagi dengan DB-1 yang tadi Bukti P-13.

Permohonan kami yang ketiga, ada DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya II, yaitu kami kehilangan suara sebanyak 644 suara pada beberapa distrik ... pada 8 distrik, yaitu Distrik Wadanku, Libarek, Pisugi, Hubikiak, Hubikosi, Musatfak, Silo Sukarno Doga, Asologaima. Perbedaan suara tersebut dibandingkan dengan Alat Bukti DA-1, dan DB-1. Dan juga ada lagi kehilangan ... mengetahui kehilangan suara pada Distrik Wame, yaitu sebanyak ... yaitu sebanyak 396 suara, dapat dibuktikan dengan DA-1.

Dan langsung ke Petitum. Yang pertama, menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua III adalah yang pertama ... adalah Partai Bulan Bintang sebanyak 63.568 suara. Dan menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD ... Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara II sebagai berikut.

Partai Bulan Bintang sebanyak 5.150 suara ... 5.151 suara, maaf, Pak. Yang kemudian, menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jayawijaya II adalah Partai Bulan Bintang sebanyak 4.985 suara.

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Dan kemudian, Yang Mulia, di dalam Permohonan kami juga menye ... me ... mengubah sedikit Permohonan kami. Karena setelah ditemukan, ada beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, ada sal ... pada ... pada Petitum yang ... Petitum ... di Petitum Nomor 4, kami salah memasukkan tabel, sehingga kami mengganti tabel dengan tabel yang benar.

Kemudian juga, kami menambah ... kami telah menemukan beberapa alat bukti lain, sehingga angka perolehan di Petitum kami juga berubah, Yang Mulia.

Jadi, kami mengubah sedikit dari Permohonan kami. Saya akan menyampaikan nanti surat ... surat perubahannya.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini, ya. Anda itu sudah diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan. Ya, kan? Ya atau tidak?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UJANG

Benar, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kalau sudah masuk fase ini, yang boleh diperbaiki itu sepanjang menyangkut redaksi, substansi tidak boleh lagi diperbaiki. Jadi, kalau Anda berubah-ubah terus, kan, bagaimana ini Termohon mau ... apa (...)

89. KETUA: ASWANTO

Menjawab.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Menjawab. Kan harus ada kepastian juga? Waktunya sudah diberi untuk memperbaiki Permohonan. Jadi, kalau Anda misalnya salah tulis, misalnya harusnya Saldi, tertulis Sadli, nah, boleh Anda perbaiki. Itu yang namanya redaksional. Tapi kalau substansi, tidak ada lagi perbaikan. Kami tetap akan berpegang kepada Permohonan yang sudah kami registrasi. Oke?

Jadi, enggak boleh juga berubah-ubah terus. Kan harus ada kepastian juga. Jadi, ini yang akan kami jadikan pedoman. Karena apa? Pemohon, Pihak Terkait, mungkin juga Bawaslu, memberikan keterangan berdasarkan ini. Ini semuanya berlaku seperti itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

91. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Silakan!

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memang dalam Permohonan ini, saya lihat juga, apalagi di dalam Petitum itu angkanya juga berubah. Betul, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UJANG

Ya, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, seperti itu. Kemudian, bukti yang ada dalam Permohonan ini hanya mencakup sampai Bukti P-11. Padahal, Saudara tadi ada mengatakan P-12, P-13. Betul, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UJANG

Hingga P-47, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tapi dalam Permohonan ini yang Saudara masih kemukakan hanya sampai Bukti P-11. Ini yang saya baca dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei, ya, 2019. Sehingga, kita tetap akan berpedoman kepada Permohonan yang tanggal 31 Mei ini.

Demikian, Yang Mulia.

97. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ini untuk kepastian karena Permohonan Saudara kita sudah kirim. Permohonan yang sudah di registrasi itu, kita sudah kirim ke Pihak-Pihak KPU, Pihak Terkait, Bawaslu, dan jawaban mereka sudah masuk. Sehingga kalau ada mau ... ada perubahan hari ini, mereka tentu bingung untuk menjawabnya lagi.

Baik. Saudara sudah advokat yang membacakan tadi? Anda advokat? Saya tanya Saudara yang pakai baju putih, Anda Advokat? Ndak mengerti Advokat?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UJANG

Belum, Bapak.

99. KETUA: ASWANTO

Oh, belum. Kalau advokat harus pakai toga, ya?

Baik, terima kasih, untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya. Silakan, siapa yang menyampaikan? Waktu Saudara 10 menit. Maksimal, ya, 10 menit.

100. KUASA KUASA HUKUM PEMOHON 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Berkarya ingin menyampaikan bahwa Permohonan yang kami ajukan untuk Provinsi Papua, Kota Jayapura, itu untuk Dapil I dan III, Yang Mulia.

101. KETUA: ASWANTO

Ya.

102. KUASA KUASA HUKUM PEMOHON 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Untuk Dapil I, pada pokoknya, kami telah menguraikan bahwa terjadi perbedaan antara perolehan suara Pemohon berdasarkan C-1 dengan hasil rekapitulasi di DA-1 yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan perolehan suara kami berubah, Yang Mulia. Diduga perubahan ini ... sua ... perubahan suara ini bergeser kepada partai lain, yaitu Partai PDI Perjuangan. Dan terhadap ini, kami telah mengajukan keberatan kepada Pihak-Pihak Bawaslu, maupun KPU, dan juga telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura untuk dilakukan penghitungan ulang. Kemudian ... tidak dilakukan oleh Pihak KPU Kota Jayapura.

Kemudian, untuk ... mohon izin, Yang Mulia. Untuk Dapil I ini, kami telah mengajukan juga bukti-bukti yang terkait dengan perubahan suara ini. Kami merujuk kepada Bukti P-73 ... mohon izin, Yang Mulia, P-74 sampai dengan Bukti P-78 yang keseluruhannya adalah sertifikat hasil penghitungan C-1, Yang Mulia.

Kemudian, terhadap keberatan-keberatan yang kami sampaikan ... Pemohon sampaikan melalui Bawaslu, merujuk kepada Bukti dari P-719 kemudian hingga P-725, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk Dapil III, Distrik Heram, Yang Mulia. Pada pokoknya, kami menyampaikan adanya penambahan suara terhadap hampir seluruh partai politik dan ini mengakibatkan suara kami juga berubah dari posisi 7 menjadi ke 13. Kemudian, terdapat 2 hasil DAA-1 yang dikeluarkan oleh PPD Heram. Kemudian, ini diakomodir oleh KPU Kota Jayapura, Yang Mulia. Dan terhadap ini pun, kami telah menyampaikan keberatan ... Pemohon telah menyampaikan keberatan, kami merujuk kepada bukti, yaitu Bukti P-71, P-72. Kemudian, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon, itu merujuk kepada Bukti P-74 hingga P-76, Yang Mulia.

Dan terakhir, di dalam Petikum. Kami telah menyampaikan Permohonan, yaitu perolehan suara untuk Pemohon, yaitu dengan

Nomor Urut 7, Abdul Rajab untuk Dapil I. Kemudian untuk Dapil III, dengan Nomor Urut 7, Delipius Yikwa.

Demikian, Yang Mulia.

103. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera. Silakan! Tolong, Petugas, miknya! Itu tadi enggak usah diutak-atik, itu sudah jalan itu tadi! Coba, Petugas, tolong dibantu!

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pemohon atas perselisihan pemilu yang terjadi di ... untuk DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 4. Yang pertama.

Yang kedua, untuk DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan I. Yang ketiga, DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan III. Yang keempat, DPRD Kabupaten Mappi, Daerah Pemilihan I. Yang kelima, DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan I. Yang keenam, DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan I. Dan yang ketujuh, DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Daerah Pemilihan II.

Poin-poin yang ingin saya ... kami sampaikan untuk DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan IV. Bahwa berdasarkan hasil dari penelitian kami bahwa Pemohon harusnya mendapatkan suara sebanyak 12.482, sementara oleh Termohon disebutkan 7.500.

Yang Mulia, pada kesempatan ini juga, izinkan kami juga untuk memberikan renvoi karena ada ... ada kesalahan input atau kesalahan tulis angka-angka yang kami cantumkan di sini. Yang pada awalnya di dalam kolom Pemohon, kami menuliskan ... menuliskan 4.982, itu harusnya ada di kolom selisih, Yang Mulia.

105. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti renvoinya dimasukkan saja nanti di ... apa ... ya (...)

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ASWANTO

Ya karena ini waktu. Jadi, nanti renvoinya dimasukkan ke (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: ASWANTO

Ke Panitera sepanjang renvoi itu tidak menyangkut substansi, ya. Mahkamah (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Tidak, Yang Mulia, hanya angka saja yang salah masuk, salah ketik.

111. KETUA: ASWANTO

Silakan!

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Kami lanjut, Yang Mulia. Bahwa menurut Pemohon (...)

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu sebentar! Itu tabel berapa tadi di Permohonan Saudara?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Tabel pertama, Yang Mulia. Halaman 9.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Jadi, ini kan ada tabel 1, ini?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Termohon=7.500?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Betul, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pemohon=4.982?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Ya.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Selisih=2.518?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apanya yang ... yang di ... direnvoi?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Yang direnvoi adalah jumlah Pemohon yang 4.982 itu masuk ke kolom selisih, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, jadi, ini pindah kolom, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Pindah kolom.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, jadi yang harusnya selisih itu pindah ke sini?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Ya.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Kemudian, yang Pemohon itu masuk angka 12.482.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, ini ... okelah. Sepanjang itu tidak substantif (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Tidak, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau ... nanti kita akan pelajari. Jangan Anda pula putusan, nanti kami yang ... yang ... apanya, ya (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami lanjutkan.

135. KETUA: ASWANTO

Silakan!

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUDJAN MUSLIM

Angka-angka tadi itu terdapat selisih yang berjumlah 4.982 itu, itu diwarnai oleh berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa kabupaten, yaitu di Kabupaten Tolikara, Puncak, Puncak Jaya.

Namun demikian, Yang Mulia, itu pun tersebar di beberapa distrik dan juga TPS, sehingga kita mengidentifa ... mengidentifikasinya kesulitan karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

Oleh karena itu, kami di dalam Petitem meminta supaya untuk ... untuk Papua IV ini dilakukan pemungutan suara ulang, Yang Mulia, dengan berbagai bukti yang sudah kita lampirkan di sini, ada banyak buktinya.

Selanjutnya, Yang Mulia. Untuk DPRD Kabupaten Puncak, Daerah Pemilihan I, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Anton Aryadi.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Baik. Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia.

Yang pertama, kami agak kesulitan membalik dokumen, Yang Mulia, karena kami tidak diberikan meja.

Yang pertama, merujuk terkait Puncak I dan Puncak III. Bahwasanya berdasarkan lampiran SK KPU Nomor 810 yang menyebutkan bahwa pedoman pelaksanaan pemungutan dengan sistem noken dan ikat dilaksanakan di 12 kabupaten di Papua, di antaranya adalah Kabupaten Puncak.

Berdasarkan hal tersebut, pada Dapil I ... kami langsung masuk kepada Distrik Ilaga Utara. Bahwasanya berdasarkan bukti ... vide Bukti P-22, suara PKS sudah ditetapkan oleh berdasar dengan sistem noken oleh kepala suku dan tokoh masyarakat sebanyak 1.112 suara, tertanggal 17 April, Bukti P-22.

Bahwa mengenai selisih bukti suara di atas, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara di Distrik Ilaga Utara sebanyak 782 suara, vide Bukti P-16, P-16A, P-17, dan P-19.

Kemudian, masuk ke Distrik Amungkalpia. Bahwa berdasarkan kesepakatan kepala suku dan tokoh masyarakat telah memberikan suara kepada PKS sebanyak 1.000 suara, dilengkapi dengan vide Bukti P-25.

Kemudian, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan dan ... pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Amungkalpia sebanyak 1.000 suara pada Bukti P-16, P-16A, P-17, P-19.

Dilanjutkan di Distrik Gome Utara, sesuai kesepakatan ikat atau noken. Bahwa kepala sukulus ... kepala suku sudah memberikan suara

kepada Saudara Yomer Balinal, calon legislatif sebanyak 3.473 suara, Bukti P-29.

Bahwa mengenai suara selisih di atas, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gome Utara sebanyak 2.749 suara, P-16, P-16A, P-17, P-19, P-31, P-23, P-33, P-34, P-35, P-36.

Bahwa kecurangan yang dialami oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 yang di antara isi rekomendasinya, yang pertama, KPU Kabupaten Puncak melakukan penghitungan suara ulang Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak di tingkat distrik di 23 distrik di Kabupaten Puncak sesuai dengan kesepakatan masyarakat secara tertulis.

Kemudian, KPU Kabupaten Puncak merekapitulasi ulang hasil perolehan suara di 23 distrik sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat secara tertulis yang telah dituangkan dalam C1-KWK berhologram dan salinannya.

Kemudian, KPU Kabupaten Puncak wajib menyerahkan salinan DA-KPU dan DA-1 DPRD kabupaten ke masing-masing saksi partai politik di tingkat distrik.

Dan bahwa Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak pernah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Nomor 36/RPU/DISTRIK-23/KAB-PUNCAK/V/2019, tertanggal 11 Mei 2019, vide Bukti P-20.

Bahwa selanjutnya, Termohon secara diam-diam telah berangkat ke Jayapura untuk melaksanakan pleno rekapitulasi hasil tingkat provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2019 dan bahwa Formulir DB-1 pemilihan presiden dan wakil presiden selanjutnya diserahkan Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat rekapitulasi tersebut di Hotel Grand Abepura.

138. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara, tolong diperhatikan!

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Lanjut ke Petikum, Pimpinan.

140. KETUA: ASWANTO

Ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Yang pertama, mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Kemudian, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk melaksanakan PSU di 25 distrik.

Kemudian, menetapkan ... atau menetapkan hasil perolehan suara menurut Pemohon di Dapil Kabupaten Puncak, Distrik Ilaga Utara=1.112, amang ... Amungkalpia=1.000, Gome Utara=3.473, dan total=5.585.

Kami lanjut ke Dapil III, Yang Mulia.

142. KETUA: ASWANTO

Dapil III, waktu Saudara sudah 11 menit. Nanti marah yang lain kalau Saudara diberikan waktu yang lebih. Kenapa Petitumnya ndak sekaligus saja? Masa Petitum per dapil, gitu?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya. Mohon izin, tambahan 5 menit, Yang Mulia.

144. KETUA: ASWANTO

Jangan! Nanti yang lain juga minta tambahan. Petitum semuanya saja!

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Baik.

146. KETUA: ASWANTO

Petitum untuk semua dapil (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

148. KETUA: ASWANTO

Kabupaten Mappi (...)

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Ya, terima kasih (...)

150. KETUA: ASWANTO

Mappi Dapil I ... Dapil I, Kepulauan Yapen. Dapil I, Lanny Jaya I dan II.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Untuk Petitum ... untuk Kabupaten Mappi, menetapkan hasil perolehan suara PKS sebesar 1.247. Untuk Kepulauan Yapen Dapil I menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil I Yapen Selatan, PKS=1.244, Partai Hanura=929, Partai Demokrat=3.176, Partai PSI=1.107.

Demikian, Yang Mulia.

152. KETUA: ASWANTO

Baik. Selesai?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Maaf, Yang Mulia, ada 1 lagi.

154. KETUA: ASWANTO

Ini gimana ini? Anda lupa-lupa Permohonan Anda ini? Masih ada Kabupaten Lanny Jaya Dapil I dan II.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan kabupaten ... DPRD Kabupaten Lanny Jaya II, Partai PKS=921, Distrik Gufura, Distrik Laninyana 32 ... 3.283, Distrik Yiluk=324. Jumlah 4.528.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Untuk Kabupaten Lanny Jaya I menetapkan suara PKS sebesar 12.500. Terima kasih, Yang Mulia.

157. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk selanjutnya, Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Waktu Saudara juga 10 menit, ya. Kuasa Hukum sudah datang? Tadi ini kita sudah panggil Saudara, tapi belum datang. Diminta untuk sidang-sidang selanjutnya agar datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Baik, Yang Mulia.

159. KETUA: ASWANTO

Kalau Anda terlambat 10 menit, Anda tidak bisa masuk lagi. Ini terlambatnya Anda banyak sekali. Silakan, untuk Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari Partai PKPI mempersalahkan di ... untuk DPR RI Dapil Papua Provinsi Papua, persandingan suara menurut Pemohon. Bahwa Partai PKPI melalui data Termohon tercatat 6.985. Berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Pemohon mendapatkan 60.933. Jadi, ada selisih sekitar 53.949 ... 90 ... 48 suara.

Dalilnya salah satunya adalah bahwa suara yang kami dapat ... bahwa melalui di Kabupaten Deiyai pemilihannya melalui sistem noken. Hal ini dibuktikan melalui kesepakatan dari kepala ... kepala pemerintah kabupaten ini melalui Wakil Papua Bupati Deiyai, ketua DPC semua partai, dan Ketua Anggota Kabupaten Deiyai, serta Caleg DPR RI yang ada. Serta mela ... melahirkan kesepakatan untuk memberikan suara kepada Saudara Petrus Mote, Buktinya melalui P-52 sampai dengan P-58.

Lalu, ke Kabupaten Yahukimo. Suara Parpol PKPI Indonesia melalui data Termohon tercatat 0. Sedangkan melalui ... menurut pendapat Pemohon adalah sekitar 163.000 suara. Jadi, ada selisih sekitar 163.000 suara.

Karena di Kabupaten Yahukimo juga menggunakan sistem noken, kami mendalilkan, kami juga mendapat melalui kesepakatan kepala suku, juga dengan disaksikan melalui dengan kepala daerahnya dengan ... dan dihadiri dengan semua partai. Bukti ini pun kami rujuk ke Bukti P-52 sampai P-58. Untuk (...)

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu sebentar! Itu buktinya sama, ya? P-52 sampai P-58?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Betul, Yang Mulia, betul.

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, ini ada di tempat yang berbeda, kok buktinya bisa sama ini?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Ya. Tercatat demikian, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, demikian. Nanti kita periksa, ya?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Baik, Yang Mulia.

Lanjut ke DPRD Tolikara Daerah Pemilihan Papua IV. Da ... menurut dalil ... suara Pemohon yang tercatat dalam data Termohon sebesar 8.414 suara. Sedangkan, menurut dalil Pemohon sebesar 37.000 suara. Jadi, ada selisih sekitar 28.586 suara. Dalil-dalilnya sebagai berikut.

Bahwa ada bebe ... di beberapa distrik tidak pernah dilakukan pleno perhitungan. Namun ... namun, tetap keluar hasil rekapitulasi di tingkat distrik. Hal ini juga ditemukan beberapa ada ... masih kotak suara yang masih tersegel, namun hasil pleno distrik tetap keluar.

Cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh kawan saya.

167. KETUA: ASWANTO

Silakan!

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk keanggotaan DPRD pada Dapil Kota Jayapura III Berdasarkan rekap DA-1 dan DB-1 Kota Jayapura, untuk data Pemohon memiliki perolehan suara 3.350, Yang Mulia. Sedangkan, untuk data pemohon ... eh ... Termohon tercatat 2.550, Yang Mulia.

169. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Ini Dapil III tidak ada di Permohonan Saudara. Dapil IV yang ada, DPRD kota dapil ... DPRD Jayapura Dapil IV. Kami yang salah atau Anda yang salah?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Mungkin kami yang salah, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia. Baik, untuk Dapil Kota Jayapura IV. Bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih pada Dapil IV Abepura, sehingga terjadi selisih berdasarkan DA-1 sebanyak 9.486, Bukti P-59 sampai P-70, Yang Mulia.

Berdasarkan rekap DA-1 dan DB-1 Kota Jayapura bahwa suara partai hanya memperoleh suara 78 suara untuk 1 Dapil Abepura. Namun, di wilayah Abepura tersebut terdiri dari 363 TPS. Sebagai contoh, sample ada 3 TPS yang kami ambil C-1 nya, Yang Mulia. Jumlah suara partai sebanyak 170 ... eh, 117. Hal ini menunjukkan hilangnya suara PKPI di daerah tersebut, Yang Mulia.

Bahwa telah terjadi berbagai macam kecurangan, maka kami meminta diadakan pemungutan suara ulang, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi di Kota Jayapura.

Lalu untuk Petitemnya. Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan KPU.

Ketiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dengan rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI untuk Kabupaten Deiyai PKPI indo ... PKPI sebanyak perolehan suara 60.933 dan untuk Kabupaten Yahukimo, PKPI memperoleh 163.000 suara.

Empat. Memerintahkan KPU melakukan PSU di Dapil Provinsi IV DPRD Provinsi di TPS pada wilayah Kabupaten Tolikara.

Lima. Memerintahkan KPU untuk melakukan PSU di seluruh TPS Dapil IV Kota Jayapura Provinsi Papua untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada wilayah Kota Jayapura.

Enam. Untuk memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Sekian, Yang Mulia.

171. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk membuat ... apa ... untuk meyakinkan kembali, ya. Yang Saudara persoalkan adalah untuk DPR RI Dapil Papua, ya? Kemudian, DPRD Provinsi Dapil IV Papua, DPRD Kota Jayapura Dapil IV. Betul, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Izin, Yang Mulia. Untuk ... bukan DPRD provinsi, tapi DPRD Kabupaten Tolikara untuk Dapil IV.

173. KETUA: ASWANTO

Lho, ini enggak ... Permohonan Saudara ... oke, baik. Sudah betul ada Dapil Tolikara dan Jayapura III dan IV, ya?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY PAHALA

Betul, Yang Mulia.

175. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia. Kuasa Hukumnya sudah hadir? Ini Kuasa Hukumnya tadi telat, ya? Ya, di depan saja dulu! Di depan saja yang ada, nanti kita diprotes lagi, "Enggak ada mejanya," katanya. Padahal, ruangnya tidak memungkinkan untuk ditambah meja lagi, ya. Nanti kalau bisa, Tim Kuasa itu satu di depan, yang lain di belakang semua, gitu, sehingga semua dapat meja agar tidak terjadi protes lagi sama dengan protes dari Kuasa Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Baik. Untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan, Kuasa Hukum, menyampaikan pokok-pokok perkara saja, ya! Kami sudah pelajari Permohonan Saudara.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Sebelumnya kami mau mengajukan renvoi untuk beberapa ... apa ... redaksional.

Pertama ... halaman pertama, itu tertera dapilnya masih Sumut ... Sumut IX, Yang Mulia. Harusnya kan penjabaran dapil untuk Papua.

177. KETUA: ASWANTO

Enggak! Miknya didekatkan sedikit, enggak terlalu kentara! Apa yang mau direnvoi?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Renvoi halaman pertama, penjabaran dapil-dapil. Di sini tertera masih Provinsi Sumatera Utara IV.

179. KETUA: ASWANTO

Wah, ini berarti Saudara juga Kuasa Hukumnya Sumatera, akhirnya copy-paste ini. Copy-paste ini, ya? Oke.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Jadi, halaman pertama. Kemudian, kedua itu (...)

181. KETUA: ASWANTO

Silakan, silakan!

182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kuasanya gerin ... apa ... perkara nomor berapa ini?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kalau Anda menyebut Dapilnya Sumatera Utara di sini, lalu dipindahkan ke Papua, itu mengubah substansi atau tidak?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Tidak, Yang Mulia, tapi masuk ke ... di dalam ARPK sih, semuanya terdaftar.

186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, Anda di sini bilangnya Sumatera Utara, lalu (...)

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Semua dapilnya penjabaran semua Papua.

188. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semuanya Papua?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Papua.

190. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang salah?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Hanya ini saja sih penjabaran nasionalnya saja sih, kalimatnya (...)

192. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di halaman berapa itu?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Halaman pertama, Yang Mulia, di bawah penjabaran pemberi kuasa.

194. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Oh, jadi ini, ya, bertindak dan untuk atas nama (...)

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

196. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Partai Politik Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara dapil itu, ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti ... nanti kita akan pertimbangkan ini, ya.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

200. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada lagi?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kemudian, halaman (...)

202. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini bisa semuanya transparan, semua orang mengetahui ini. Halaman berapa? Ini karena terlalu banyak order, juga susah juga ini, tidak hati-hati juga para lawyer ini.

203. KETUA: ASWANTO

Ini terlalu banyak yang ... apa namanya (...)

204. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa lagi? Halaman berapa?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Halaman (...)

206. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Biar saya bacakan, yang lain juga tahu. Coba Anda bayangkan ini? Menjilidnya saja ... saya lihat ini, Kuasa Hukum Gerindra! Ini kan biasanya kan jilidnya begini, kan, orang melihatnya? Tapi, jilidnya begini nih ke sini, kayak baca ... apa ... tulisan Arab kita.

Silakan, halaman berapa lagi yang harus diperbaiki?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Kemudian, halaman 44.

208. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

44.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Halaman 44.

210. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, sabar! Ini kan karena tidak lazim ini. Silakan, 44 yang mana?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Halaman 44, di situ untuk seharusnya Lanny Jaya III. Soalnya (...)

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Etius Wenda, Calon DPRD Kabupaten Lanny Jaya III.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Lanny Jaya III. Di bawahnya penjabarannya Etius Wenda, Lanny Jaya III. Di sini masih Lanny Jaya II yang di ... tertera di ... yang di ... yang di register.

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini ditambah satu garis saja, ya?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Satu garis.

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini penting loh. Kalau Anda dapat honor kurang 0-nya satu, kan susah juga itu. Sudah. Sudah, Pak Ketua.

219. KETUA: ASWANTO

Lanny Jaya II, ya, diganti jadi Lanny Jaya III, ya?

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini gini (...)

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Memang seharusnya III. Karena di bawahnya penjabarannya memang III

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di atasnya masih tertulis Lanny Jaya II (...)

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

II.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di kolom penjelasannya sudah Lanny Jaya III. Nah, kita tambah satu saja, begitu, ya? Nanti kalau honor Anda hilang 0-nya satu, kita enggak tanggung jawab itu.

Baik, silakan, Pak Ketua!

225. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan dilanjutkan! Terima kasih, Yang Mulia. Ini bingung sangking banyaknya yang diwakili ini.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, ada 7 dapil, Yang Mulia.

227. KETUA: ASWANTO

Jilidnya juga jilid ... anu ... Arab.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Terbiasa baca Alquran, Yang Mulia.
Ya, langsung saja (...)

229. KETUA: ASWANTO

Silakan! Ini Saudara mempersoalkan ada 5, ya? Ada berapa ... ada (...)

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ada 7.

231. KETUA: ASWANTO

7 dapil, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

7 dapil, Yang Mulia.

233. KETUA: ASWANTO

Silakan!

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Pertama, untuk Dapil Papua DPR RI. Itu terjadi ... apa ... terjadi kesalahan penginputan, dimana Pemohon kehilangan suara sebanyak 30.211 suara, yang ter ... yang terbagi ke dalam ... ke dalam 3 kabupaten, Yang Mulia. Pertama, Jayawijaya ... maaf, maaf, kembali lagi. Dimana suara ... menurut Termohon tertera 83.693 suara, sedangkan menurut Pemohon=100 ... 100.000 ... 111 ... eh, 113.904 suara.

Untuk kabupaten yang terjadi selisih, untuk Kabupaten Jayawijaya, menurut Termohon, suara kami itu=0. Kemudian, menurut kami=8 ... 8.517 suara. Di sini kami untuk buktinya ... untuk Jayawijaya, Bukti DB-1 ada di P.2.DPR-RI.I-13. Kemudian, dimulai dari P.2.DPR-RI.I-6 hingga (...)

235. KETUA: ASWANTO

Kami juga kesulitan membaca karena Arab gitu, ya.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Enggak, Yang Mulia, ini berbeda.

237. KETUA: ASWANTO

Berbeda? Berarti sengaja membuat Hakimnya pusing gitu, ya?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Harus mempermudah. Hingga P.2 ... eh, P.2.DPR-RI.I-10, maaf. Kemudian, untuk Kabupaten Lanny Jaya (...)

239. KETUA: ASWANTO

Lanny Jaya Dapil III, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Bukan, Yang Mulia. Ini masih ... masih yang sama untuk DPR RI (...)

241. KETUA: ASWANTO

Oh, untuk DPR RI, ya?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Masih sama. Tapi, kabupaten permasalahan terjadi di Lanny Jaya.

243. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan! Anda ingat waktu Saudara.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Termohon ... menurut Termohon=23.000 ... 23.237 suara. Menurut Pemohon=42.604 suara. Buktinya itu ada di P.2.DPR-RI.I-15 hingga P.2.DPR-RI.I-46. Dimana untuk Kabupaten Lanny Jaya, kami ke ... kehilangan ... kehilangan 19.367 suara.

Kemudian, untuk Kabupaten Asmat, kami kehilangan sekitar 2.327 suara.

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Asmat berapa? 2.000 (...)

246. KETUA: ASWANTO

327.

247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

327, ya?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

327. Untuk Petitumnya, kami meminta untuk mengabulkan Permohonan Pemohon. Tentunya membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8 KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya, ketiga. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Rekapitulasi perolehan hasil suara Anggota DPR RI Papua atas nama Steven Abraham, menurut Termohon=83.693 suara, dan menurut Pemohon yang sebenarnya adalah 113.904 suara.

Untuk berikutnya, dapil yang sama akan dibacakan oleh rekan saya.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERWIN SYAHRUDDIN

Ya.

250. KETUA: ASWANTO

Sudah tinggal sedikit.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERWIN SYAHRUDDIN

Ya, sebentar saja, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Di sini Dapil II atas nama Rida Kogaya, sebentar Yang Mulia, agak susah. Langsung saja, jadi kita di numbering-nya, Yang Mulia (...)

252. KETUA: ASWANTO

Ya.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERWIN SYAHRUDDIN

Kita akan ganti dengan nomor, bukan ang ... bukan huruf.

254. KETUA: ASWANTO

Ya.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERWIN SYAHRUDDIN

Jadi, biar memudahkan kita dan itu kita sesuaikan dengan dapil yang lain.

Dan untuk di poin 2 sama poin 3, kita memberikan sedikit elaborative agar bisa memperjelas Hakim dalam memberikan keputusannya.

256. KETUA: ASWANTO

Ini Anda perbaikan atau Anda menyampaikan?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERWIN SYAHRUDDIN

Saya perbaikan, Yang Mulia.

258. KETUA: ASWANTO

Lho, tadi kan ... tadi kan sudah disampaikan, yang sekarang Anda lanjutkan. Tadi dap ... DPR RI Dapil Papua sudah, sekarang DPRD Provinsi Dapil VII, DPRD Provinsi Dapil II, yang mana yang Saudara mau jelaskan?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERWIN SYAHRUDDIN

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Jadi, saya langsung ke substansinya saja.

Jadi, di Lanny Jaya II, di sini di Distrik Muara, harusnya sebesar 2.363 sesuai dengan yang di dalil. Kemudian, DB-1 nya kosong. Nah, itu

enggak ada ... enggak ada perbaikan. Cuma izinkan kita untuk memberikan sedikit tabel perbandingan biar untuk memperjelas.

Kemudian di poin F, yang di sini di Distrik Poga, ini tidak ada perbaikan. Yang ada perbaikan itu di poin G, yaitu Bimba Poga, itu mohon maaf, agar istilahnya diperbaiki. Di Distrik Bimba. Bimba Poga, poin G, itu diganti Dimba.

Oke. Seperti itu saja, Yang Mulia.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Baik, Yang Mulia. Izin kami lanjutkan untuk (...)

261. KETUA: ASWANTO

Yang mana yang Saudara mau jelaskan? Jangan perbaikan lagi!

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Yang Mulia, kami tidak ada perbaikan. Kami bacakan yang pokok saja untuk Dapil Papua DPR RI.

263. KETUA: ASWANTO

Lho, tadi kan sudah Dapil Papua DPR RI?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Yang Mulia (...)

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ini ada 1 dapil yang sama, Yang Mulia.

266. KETUA: ASWANTO

Ini gimana sih ini caranya!

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

1 Dapil yang sama untuk 2 caleg.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Ada 2 orang. Mohon izin, Yang Mulia.

269. KETUA: ASWANTO

Silakan, ya!

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Terima kasih, Yang Mulia. Menurut Pemohon, sesuai dengan Permohonan yang sudah ada di Yang Mulia, mulai dari poin 2 tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.8 tersebar di 8 kabupaten, Pemohon ... suara Pemohon dikurangi oleh Termohon. Mohon agar yang tidak dapat dibacakan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berikut. Sehingga suara Pemohon untuk 8 kabupaten dikurangi, keseluruhan adalah 53.003 suara. Dari total 11.000 ... minta maaf, saya sebut, 116.589 suara. Berdasarkan perhitungan mulai dari tabel 2.1 sampai tabel 2.8. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikut. Karena itu berdasarkan Bukti P-02 sampai dengan P-09, Yang Mulia.

271. KETUA: ASWANTO

Ya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Berikut kami lampirkan juga mulai dari Bukti P-12 sampai dengan P-31. Di sana ada rekomendasi dari Bawaslu, sehingga kami langsung masuk ke Petitum.

Yang pertama adalah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan seterusnya.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan tabel yang sudah kami sampaikan dari tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.8.

Berikutnya. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU terhadap 8 kabupaten.

Izin, Yang Mulia. Yang terakhir, untuk Dapil VII Provinsi Papua, Nomor Urut 1, suara Pemohon telah dikurangi oleh Termohon terdapat di Kabupaten Mappi ada di tabel pertama.

Kemudian, Petitem.

Satu. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan KPU Republik Indonesia, dan seterusnya.

Keempat. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU ulang ... PSU, maaf. Di Dapil VII Provinsi Papua, 3 kabupaten, Kabupaten Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.

Terima kasih, Yang Mulia.

273. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Sekarang giliran kami untuk melakukan beberapa hal klarifikasi.

Semua sudah ... ada enam perkara sudah menyampaikan, ya, pokok-pokok permohonannya, walaupun kami tahu bahwa Anda bingung dengan waktu yang ditentukan selama 10 menit saja. Tapi ini masih ada waktu bagi kita, Hakim, untuk melakukan klarifikasi, sehingga Anda bisa memberi komentar lagi di situ nanti.

Silakan, Prof.

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Coba ... apa ... ya, PDI-P ... yang Kuasa PDI-P. Di ... untuk khusus DPR RI Dapil Papua, ya, Anda kan mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 6 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, ya, sebanyak 22.472 suara. Benar? Benar, ya? Ini jangan ... apa ... keluarkan suaranya sedikit, masa lawyer enggak kedengaran suaranya di persidangan.

275. KETUA: ASWANTO

Miknya dinyalakan, Pak!

276. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

278. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Kemudian, Kabupaten Nabire=71.226? Ya atau tidak?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Nabire, ya, 71.226.

280. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini buktinya bahwa Hakim sudah baca Permohonan Saudara.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

282. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semalam kita sampai tengah ... apa ... lewat malam ini ... apanya ... gelar perkaranya.

Dogiyai=50.517?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Dogiyai=45.777.

284. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

45.777.

286. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ... coba saya cek. Mana yang Golkar? Sebentar, ya!

Itu di halaman berapa yang Anda sebut 477 tadi?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Halaman 7, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Halaman 7, di kolom berapa itu?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Di kolom (...)

290. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dogiyai, ya?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya. Ketiga.

292. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dogiyai (...)

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Nomor 3, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda kehilangan 4.577, ya, di sini?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

295. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. 45.777, ini triple 7 ini.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Nomor cantik.

297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemudian, Intan Jaya, Anda kehilangan 45.067, ya?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya, betul, Yang Mulia.

299. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

45.067.
Tolikara, Anda kehilangan 23.274?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lalu kemudian, di Yahukimo, Anda kehilangan 42.130?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Sehingga total suara yang dikurangi jumlahnya 250.426, itu yang Saudara dalilkan, ya?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, meskipun kami nanti harus cek ini buktinya. Oke.
Nah, ini kami menemukan fakta antara yang Anda sebutkan dalam kolom, itu berbeda dengan yang dielaborasi. Di kolom itu Anda menyebutkan untuk ... apa ... untuk Kabupaten Dogiyai itu 45.777, tapi

di penjelasannya tidak begitu. Anda lihat nanti di halaman 6 yang Saudara beri keterangan.

Oke, nanti itu tugas kamilah mengeceknya soal perbedaan-perbedaan seperti itu. Ini soal angka-angka ini memang rumit ini, orang selalu berkelahi karena angka-angka dari dulu ini. Jadi, kalau Anda tidak presisi menulis angkanya bisa jadi masalah.

Itu, Pak Ketua, yang ... apa ... klarifikasi untuk PDI-P (...)

306. KETUA: ASWANTO

PDI-P. Baik.

Untuk PDI-P juga, ini Kuasanya ada 50 orang, ya? 51, ya?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya, Yang Mulia, ya.

308. KETUA: ASWANTO

Yang hadir di ruangan kita untuk sidang sekarang siapa, Pak?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Saya Imran Mahfudi, Pak.

310. KETUA: ASWANTO

Imran ... ini soalnya ada yang ... ada 12 yang belum tanda tangan. Bapak sudah tanda tangan?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Sudah, Pak.

312. KETUA: ASWANTO

Pak Imran ... Imran Mahfudi, ya?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Ya.

314. KETUA: ASWANTO

Oke, sudah tanda tangan.
Yang satu lagi?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benny Hutabarat.

316. KETUA: ASWANTO

Pak Benny, sudah tanda tangan?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENNY HUTABARAT

Sudah, Yang Mulia.

318. KETUA: ASWANTO

Ya.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Nomor 34.

320. KETUA: ASWANTO

Ya, tapi enggak ada nomornya di tanda ... tempat tanda tangan. 2 orang yang hadir?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

2 orang.

322. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini untuk ... apa namanya ... memastikan bahwa yang hadir disini adalah memang sudah menandatangani Surat Kuasa. Walaupun kita sama-sama maklum bahwa kuasa ini sekalipun 51 bisa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Tetapi kalau yang sendiri-sendiri itu belum tanda tangan, tentu akan jadi problem kalau dia maju. Benny ...

Benny Hutabarat sudah tanda tangan, ya? Oke. Ada koreksi untuk PDI-P? Cukup, ya? Silakan, Prof. Saldi, untuk yang selanjutnya.

Untuk ini kita sahkan bukti dulu, ya? Untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI-P Perjuangan Provinsi Papua, daftar bukti untuk DPR RI papu ... P-1 sampai P-41, ya? Betul. DPRD Provinsi Papua Dapil V, P-1 sampai P-6. Betul, ya? DPRD Kota Jayapura Dapil III, P-1 sampai dengan P-9?

Nah, ada catatan, P-8 belum ada fisiknya. Nanti kita sahkan, kecuali, ya, untuk DPRD Kota Jayapura, P-8 belum ada fisik, ya? Kemudian, DPRD Kota Jayapura Dapil IV, P-1 sampai dengan P-6. DPRD Kabupaten Puncak Dapil III, P-1 sampai dengan P-12?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

324. KETUA: ASWANTO

Betul, ya? DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil I, P-1 sampai dengan P-30?

325. KUASA HUKUM PEMOHON NO 83: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

326. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, untuk DPRD Kabupaten Tolikara Dapil II, P-1 sampai dengan P-4. Benar, ya?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

328. KETUA: ASWANTO

DPRD Kabupaten Mamberamo ... Mamberamo, Mamberamo Tengah Dapil II, P-1 sampai dengan P-4?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Benar, Yang Mulia.

330. KETUA: ASWANTO

Betul. Kita sahkan, kecuali untuk DPRD Kota Jayapura Dapil III, P-8 belum ada fisiknya.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Apa masih bisa ... sudah tidak ada kesempatan lagi, Yang Mulia? Atau bagaimana yang fisiknya itu?

332. KETUA: ASWANTO

Bisa. Bisa, ya. Oke. Nanti ditambahkan.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

334. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan selain yang P-8, ya?

KETUK PALU 1X

Nanti fisiknya di ... segera dimasukkan, ya? Untuk P-8 DPRD Kota Jayapura Dapil III.

Untuk Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PBB, daftar bukti P-1 sampai dengan P-6, betul, ya?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Ya, Pak.

336. KETUA: ASWANTO

Kemudian, ada catatan, ya, sebelum kita sahkan P-1 sampai P-6. Surat Kuasa ini belum ada aslinya, ya? Tolong nanti aslinya! Yang diserahkan baru kopian, ya?

Kemudian, di Surat Kuasa juga atas nama Muhammad Iqbal itu belum tanda tangan. Ada? Di dalam ruangan ini ada, Iqbal? Atau di ruangan lain?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Enggak ada, Yang Mulia.

338. KETUA: ASWANTO

Ya. Karena ini kan kita paralel di 3 panel, ya?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: H. YASIN

Ya.

340. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sahkan P-1 sampai dengan P-6, ya?

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 partai bulan bin ... bulan karya ... Berkarya. Ini kok bulan berkarya ini? 7 itu ... Partai Beringin Karya, sori, Partai Beringin Karya. Oke, enggak apa-apa. Partai Beringin Berkarya, di Surat Kuasa juga ada yang belum tanda tangan atas nama Abdul Salam.

Kemudian, bukti untuk DPRD Kota Jayapura Dapil I, P-1 ... eh ... P-7-1 sampai dengan P-7-26, betul, ya?

Kemudian, DPRD Kota Jayapura Dapil III, P-1 ... 7 ... P-71 sampai dengan P-711?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Betul, Yang Mulia.

342. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ABDUL LUKMAN HAKIM

Betul, Yang Mulia.

344. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKS. Daftar bukti ... ini daftar bukti per dapil, tapi gelondongan ini, ya? P-1 sampai dengan P-143? Enggak, yang ... yang sudah dimasukkan? Yang tambahan, kan harus diverifikasi dulu kebenarannya. Ini yang sudah diverifikasi, ya? Sudah diverifikasi, P-1 sampai dengan P-143, ya?

KETUK PALU 1X

Nanti, tambahannya dimasukkan saja biar segera diverifikasi untuk kemudian pada sidang berikutnya kita bisa sahkan.

Untuk ... untuk Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Muhammad Nur Aris ada di sini? Kuasa Hukum? Atau di ruangan lain?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Belum hadir, Yang Mulia.

346. KETUA: ASWANTO

Belum hadir, ya? Ini belum tanda tangan, ya?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Siap, Yang Mulia.

348. KETUA: ASWANTO

Tony Hendrico Sianipar?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya.

350. KETUA: ASWANTO

Juga belum tanda tangan?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Siap, Yang Mulia.

352. KETUA: ASWANTO

Nanti dilengkapi, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Siap.

354. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Perkara Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, DPR RI, ya, P-01 sampai dengan P-09?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya, Yang Mulia.

356. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?
Kemudian, untuk DPRD Kabupaten Tolikara Papua IV, P-01 sampai dengan P-25?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya, Yang Mulia.

358. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk DPRD Dapil III dan Dapil IV Kota Jayapura, P-01 sampai dengan P-12?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya, Yang Mulia.

360. KETUA: ASWANTO

Kemudian, tambahan alat bukti PB-1 sampai dengan PB-22?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya, Yang Mulia.

362. KETUA: ASWANTO

Itu baru daftar bukti, bukti fisik belum ada?

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Belum, Yang Mulia.

364. KETUA: ASWANTO

Ya. Kita sahkan yang sudah ada, ya?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Siap, Yang Mulia.

366. KETUA: ASWANTO

Yang daftar bukti, kita belum bisa sahkan (...)

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya.

368. KETUA: ASWANTO

Karena baru daftarnya.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FERDINAND MARTINUS WODA

Ya.

370. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD Kabupaten Jayawijaya I, itu P-2 ... P-2.DPRD-Kab-1 sampai dengan P-2.DPRD-Kab-15?

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.

372. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul.

374. KETUA: ASWANTO

Dua untuk DPRD Kabupaten Lanny Jaya II, P-2.DPRD-Kab-1 sampai dengan P-2.DPRD-Kab-2. Betul, ya? Eh, Kab-11, ya? Kab-11?

Ini ... apa ... kode ... kode buktinya ... sebenarnya, kode bukti tidak bisa seenaknya, gitu, ya. Ada ... ada standar untuk memberi kode bukti, ya.

Kemudian, DPRD Kabupaten Lanny Jaya III. P-2.DPRD-Kab-1 sampai dengan P-2.DPRD-Kab-12.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.

376. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul.

378. KETUA: ASWANTO

Empat. DPRD ... DPR RI Papua, P-2.DPRRI.1-1 sampai dengan P-2.DPRRI.1-48.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Mohon izin, Yang Mulia. Itu DPR RI, kami ada 2.

380. KETUA: ASWANTO

Ya. DPR RI P (...)

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Atas nama ... ada 1 dapil yang sama.

382. KETUA: ASWANTO

Ini untuk Steven Abraham?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Steven Abraham.

384. KETUA: ASWANTO

Ya. Steven Abra ... Steven Abraham ini P-2.DPRRI.1-1 sampai dengan P-2.DPRRI.1-48.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia. Benar.

386. KETUA: ASWANTO

Ini bukti video belum dileges, ya?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Bukti video.

388. KETUA: ASWANTO

Ini dileges yang bukti video ini, ya?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Siap, Yang Mulia.

390. KETUA: ASWANTO

Kemudian, DPR RI Papua Nomor Urut 8, atas nama Yan Permenas Mandenas ... Mandenas, itu P-01 sampai dengan P-10. Betul, ya? Anda juga di dalam daftar bukti menyebut P-11, tapi tidak ada bukti fisiknya.

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Izin, Yang Mulia. Rekan saya yang menjelaskan.

392. KETUA: ASWANTO

Silakan di (...)

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Terima kasih, Yang Mulia.

394. KETUA: ASWANTO

He eh.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Kami ada bukti tambahan pada tanggal 31, untuk Nomor 8, mulai dari P-1 sampai dengan P-37, Yang Mulia. Mohon (...)

396. KETUA: ASWANTO

Ya. Tadi kan sudah. Sudah disebut tadi, kan? Ini untuk ... saya ulangi lagi, untuk DPR RI Papua atas nama Yan Perman ... Permenas Mandenas, itu bukti yang Saudara masukkan P-01 sampai dengan P-11. Tapi, ternyata P-11 enggak ada fisiknya. Oke, jadi P-1 sampai dengan P-37?

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Benar, Yang Mulia.

398. KETUA: ASWANTO

Tapi P-11 enggak ada fisiknya?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Benar, Yang Mulia.

400. KETUA: ASWANTO

Oke. P-31 juga, P-32 enggak ada fisiknya. Jadi, ada 3 yang tidak ada fisiknya, P-11, P-31, dan P-32. Dari bukti yang Anda masukkan P-01 sampai P-37, ya?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Baik, Yang Mulia.

402. KETUA: ASWANTO

Ada 3 yang enggak ada fisiknya. Saya ulangi, yang tidak ada fisiknya P-11, P-31, dan P-32. Betul, ya?

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Benar, Yang Mulia.

404. KETUA: ASWANTO

Baik, kemudian untuk DPR ... untuk dapil VII, Viktorianus Ohoiwutun Anda memasukkan Bukti P-01, sampai dengan P-02.1, sampai dengan P-02.20, P-03, sampai dengan P-06. Betul, ya?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Benar, Yang Mulia.

406. KETUA: ASWANTO

Untuk dapil VII?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT RUSBAL

Benar, Yang Mulia.

408. KETUA: ASWANTO

Dapil II ... untuk Dapil II Papua, Anda memasukan P-2.DPRD-Prov-2-1 sampai dengan P-2.DPRD-Prov.2-3, ya. Kemudian, Anda juga memasukkan bukti untuk dapil VII Papua lagi, ini P-2.DPRD-Prov.1-1

sampai dengan P-2.DPRD-Prov.1-3, dan ternyata ini fisiknya sama. Sama dengan yang di atas tadi yang Dapil II Papua. Betul, ya?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Mohon izin, Yang Mulia. Sampai hingga bukti nomor berapa?

410. KETUA: ASWANTO

Saya ulangi.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

412. KETUA: ASWANTO

Untuk DPRD Provinsi Dapil II (...)

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

He eh.

414. KETUA: ASWANTO

Anda memasukkan P-2.DPRD (...)

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

He em.

416. KETUA: ASWANTO

Prov.2-1.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

418. KETUA: ASWANTO

Sampai dengan P-2.DPRD-Prov.2.3.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.

420. KETUA: ASWANTO

Nah, kemudian Anda juga memasukkan untuk Dapil VII. Dapil VII itu DPRD Papua Dapil VII, P-2.DPR-Prov.1.1 dan P-2 ... sampai dengan P-2.DPRD-Prov.1-3, ternyata isinya sama dengan yang di atas tadi?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.

422. KETUA: ASWANTO

Sama? Betul, ya?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, 2 kali masuk bukti.

424. KETUA: ASWANTO

2 kali dimasukkan, ya?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, itu pertama, untuk bukti awal.

426. KETUA: ASWANTO

Baik. Kecuali yang belum ada fisiknya, kita tidak sahkan. Yang sudah ada fisiknya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Lanny Jaya III tadi di ... belum dibacakan, ya?

428. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah, Lanny jaya III sudah.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

11, Yang Mulia. Oh, ya.

430. KETUA: ASWANTO

Ini sudah tadi, kan? Lanny Jaya III Etius Wenda?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.

432. KETUA: ASWANTO

Itu P-2.DPRD-Kab-1 sampai dengan P-2.DPRD-Kab.12?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul.

434. KETUA: ASWANTO

Tadi sudah dibacakan. Ini terlalu ... terlalu banyak yang diwakili, jadi bingung dia.

Baik. Sidang kita hari ini untuk 6 perkara sudah selesai, giliran Pemohon. Nanti sidang berikutnya giliran Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Nah, untuk sidang berikutnya, untuk Perkara Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu ditunda hari Senin, tanggal 15 Juli, pukul 08.00

WIB, agendanya atau acaranya mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan bukti Termohon, bukti Bawaslu, dan bukti Pihak Terkait.

Penyampaian ini sekaligus berlaku sebagai panggilan sidang, ya? Jadi, jangan lagi nanti, "Ndak ada undangannya kami terima." Ini berlaku sebagai undangan sidang.

Baik, ya. Jam ... saya ulangi lagi, hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. Betul, ya? Sudah paham, ya? Kita minta untuk semua pihak agar hadir sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan kami akan sepakat, yang telat apa boleh buat, Kuasa Hukumnya kita tempatkan di luar. Nanti kita kasih kursi di luar yang telat.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.39 WIB

Jakarta, 9 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.